

BAB III

GAMBARAN UMUM NU PADA TAHUN 1940-AN

A. Signifikansi Posisi NU Sebagai Gerakan Sosial-Keagamaan

Pada dekade 1940-an atau lebih dikenal dengan masa sebelum kemerdekaan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan lebih menekankan pada ajaran *Ahl Al-Sunnah Wal-Jama'ah* melalui pendidikan pesantren para kyai saat itu lebih menampilkan diri sebagai pengembang gerakan keagamaan, dimana ajaran dari empat madzhab menjadi doktrin utamanya, seraya melakukan Islamisasi massa ditingkat pedesaan. Di mata masyarakat sekitar pesantren yang pada umumnya adalah masyarakat desa. Kyai adalah figur pemimpin informal yang cukup disegani. Sehingga komunitas pesantren menjadi sebuah simbol ketaatan hidup beragama yang solid dibawah pengaruh kuat para kyai. dan dengan eksistensi yang sedemikian itu, kalangan penjajah atau elit politik menganggap mereka sebagai sesuatu yang harus ditaklukan karena mereka potensial untuk menjadi kekuatan politik yang tangguh dengan basis massa yang kuat.

NU adalah gerakan sosial-keagamaan yang didirikan oleh para ulama yang rata-rata menjadi pimpinan pondok pesantren yang terbesar di daerah-daerah. Keberadaan NU dan pesantrennya jika ditinjau dari konteks kesejarahan, dapat di pahami sebagai sifat menjauhkan diri atau *uzlah* akibat politik yang diterapkan oleh penjajahan Belanda, sehingga umat Islam melakukan eksperimen-eksperimen dan pengunduran diri setelah

terdesak oleh Belanda.⁵⁹ Seiring dengan itu, maka pesantren tumbuh dan berkembang di daerah yang sepi dari keramaian, yaitu di pedesaan sehingga pesantren mempunyai kaitan erat dengan masyarakat pedesaan dan tradisi kehidupan pedesaan yang sederhana dan pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.⁶⁰

Pada masa penjajahan Belanda, dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda selalu mengesampingkan Islam dan umatnya. Sehingga kebijakan dan keputusan apapun yang sekiranya dapat menindas umat Islam selalu mendapat perlawanan yang serius. Pada masa ini, Belanda menggunakan para birokrat sebagai alat perpanjangan kekuasaannya serta menyingkirkan umat Islam sebagai saingannya.⁶¹

NU sejak pendiriannya merupakan *Jama'ah Diniyah* (organisasi keagamaan) yang melengkapi organisasi-organisasi sosial-kebangsaan dan sosial-keagamaan yang sebelumnya sudah ada, diantaranya Budi Utomo yang berdiri tahun 1908, Sarikat Islam (SI) pada tahun 1912, dan Sarikat Dagang Islam pada Tahun 1908.⁶² Selanjutnya NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam.⁶³

⁵⁹Ahmad Syafi'i Ma'arief, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1996, Hlm. 55.

⁶⁰Razikin Damam, *Membidik NU: Dilema Percaturan NU Pasca Khittah*, Gamma Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 81-82

⁶¹Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985, Hlm. 62-63

⁶²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Salamadani, Bandung, 2010, Hlm. 353 .

⁶³Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*, Jatayu, Solo, 1985, Hlm. 32.

B. Respon NU terhadap Kebijakan Politik Jepang

Sejak kedatangan di Indonesia, Jepang mula-mula disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu Jepang berusaha mendekati orang Islam dengan keinginan membebaskan dari pemerintahan Kristen, dengan menebarkan adanya persamaan antara Shinto dengan agama Islam, serta melukiskan suatu gambar tentang kekuasaan dunia Islam yang terpusat di sekitar kekuasaan khalifah Jepang Raya.⁶⁴ Dengan berbagai alasan tersebut maka menjadikan orang Islam menerima kedatangan dengan senang hati.

Wujud dari simpati bangsa Indonesia terhadap pemerintah Jepang adalah NU melalui MIAI memprakasai pengiriman delegasi ke Jepang untuk menghadiri perkumpulan Nippon guna mengunjungi “*The Islamic Exhibition*” di Tokyo dan Osaka. Delegasi tersebut berjumlah empat orang yaitu Abdul Kahar Muzakir, H. Farid Ma’ruf, Mr. Kasman dan K. H. Mahfud Shiddiq (dari NU).⁶⁵

Ketika Hindia-Belanda terancam kedatangan Jepang, pemerintah kolonial mengeluarkan maklumat untuk bangsa Indonesia berkaitan tentang pembentukan milisi dan *Bloedtransfoesie* (pemindahan darah dari satu orang ke orang lain yang membutuhkannya). Kemudian NU bersama MIAI mengadakan kongrs muslimin Indonesia yang dilakukan di Solo, yang antara lain membicarakan permasalahan di atas. Mengenai permasalahan pembentuka milisi sidang mempersilahkan kepada K. H. Ahmad Ilyas

⁶⁴Harry J. Benda, *Op. Cit*, Hlm. 165.

⁶⁵Choirul Anam, *Op. Cit*, Hlm. 102.

untuk membuat konsiderannya (pertimbangan). Sedangkan mengenai permasalahan *bloedtransfoesie* telah terjadi perang pendapat yang cukup sengit antara anggota.

Dalam hal ini beberapa anggota dari partai *islam* lain memperbolehkan *bloedtransfoesie* dengan alasan bahwa hal tersebut bertujuan untuk menolong orang yang sakit terutama yang kekurangan darah. Namun NU dan PII memberikan dua alternatif, pertama pemindahan darah kelain tubuh yang kekurangan darah guna pengobatan maka hukumnya pemberian. Kedua, jika karena pemberian darah itu menyebabkan suatu perkara yang terlarang, misalnya untuk peperangan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, maka hukum pemberian tersebut menjadi haram.⁶⁶

Namun dengan demikian kongres yang ketiga di Solo tersebut berakhir dengan keputusan bulat melarang atau mengharamkan milisi dan *bloedtransfoesie* bagi umat islam untuk kepentingan Belanda. Hal ini dikarenakan perintah tersebut telah membantu pemerintahan kafir yang telah menjajah bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang seharusnya dienyahkan dari bumi persada.

Jepang menyadari akan arti pentingnya dukungan kekuatan Islam yang merupakan unsur kekuatan di desa Indonesia. Oleh karena itu Jepang berusaha membuat suatu rencana kebijakan yang ditujukan untuk

⁶⁶*Ibid*, Hlm. 102-103.

memenangkan dukungan Islam. Kebijakan tersebut ditujukan terutama kepada masalah-masalah Islam ditingkat pedesaan.

Pada tanggal 7 maret 1947 tentara Jepang membentuk gunseikanbu pemerintah militer serta menyebarkan maklumat No. 1 yang berbunyi,

“Karena bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon dan juga hendak mendirikan ketentraman yang tangguh untuk hidup dan makmur bersama-sama dengan rakyat indonesia atas dasar mempertahankan Asia Timur raya bersama-sama maka dari itu bala tentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah yang telah di tempatinya agar supaya mendatangkan keamanan yang senantiasa dengan segera.”⁶⁷

Didengungkannya malumat No. 1 tersebut membuat NU bersikap hati-hati, karena ulam-ulama NU senantiasa berpegang teguh pada *Al-Harbu Hid'ah*, perang itu hanya tipu muslihat. Buktinya janji yang disampaikan Jepang pada masa awal kedatangannya kepada rakyat Indonesia hanyalah kebohongan belaka. Jepang yang ingin menciptakan ketentraman atas dasar mempertahankan Asia Timur Raya justru menjadikan bangsa Indonesia sebagai tanah jajahan. Semboyan “Prajurit Ekonomi” yang digembor-gemborkan Jepang tidak lain hanya kuli paksa berupa *romusha*.⁶⁸ Tenaga kerja wanita yang dijanjikan pekerja sebagai plang merah ternyata dijadikan sebagai pemuas nafsu serdadu Jepang. Selain itu rakyat indonesia diwajibkan setiap pagi untuk meghadap arah

⁶⁷Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Anzor: Sebuah percikan Sejarah Kelahiran*, Majalah Aula, Surabaya, 1990, Hlm. 92. George

⁶⁸McTunan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok, 2013, Hlm. 138.

istana kaisar Jepang di Tokyo untuk melakukan *saikerei*.⁶⁹ upacara ritual dengan membungkukan badan ke arah kaisar, ini dinilai oleh kebanyakan umat *islam* menyerupai ruku' dalam sholat, oleh karena itu tidak dibenarkan dalam tauhid.⁷⁰

Adanya kebijakan *saikerei* tersebut, NU langsung menyatakan penolakannya. Tokoh NU, K. H. Hasyim Asy'ari memandang bahwa tindakan itu berarti menyembah kepada selain Allah yang merupakan suatu perbuatan syirik, beliau secara terbuka dan terang-terangan menolaknya.⁷¹ Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh K. H. Asy'ari maka Jepang berusaha menghambatnya dengan menjebloskan K. H. Asy'ari selaku Rais akbar NU kedalam penjara pada bulan April 1942 dengan alasan yang tidak jelas.⁷²

Kejadian tersebut menimbulkan kegoncangan dikalangan NU, dan seluruh warganya diseluruh indonesia. Kemudian kegoncangan kedua dengan ditangkapnya K. H. Mahfoed Siddiq selaku ketua PBNU dengan tuduhan melakukan gerakan anti Jepang. Penangkapan kedua tokoh NU itu karena dituduh mendalangi aksi perusakan pabrik gula Jombang dekat pesantren Tebuireng. Tentu saja alasan itu terkesan di buat-buat oleh Jepang. Yang jelas kedua tokoh tersebut ditangkap karena menolak melakukan *saikerei*. Bahkan K. H. Hasyim Asy'ari menyerukan kepada

⁶⁹Choirul Anam, *Op. Cit*, Hlm. 92.

⁷⁰Harry J. Benda, *Op. Cit*, Hlm. 36.

⁷¹Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad*, Pustaka Compass, Tangerang, 2014, Hlm. 128.

⁷²Syaifudin Zuhri, *K. H Abdul Wahab Chasbullah Bapak dan Pendiri Nahdhotul Ulama*, Yamunu, Jakarta, 1972, Hlm. 46.

seluruh umat khususnya warga NU untuk tidak melakukan *saikerei* karena hukumnya haram.⁷³

Peristiwa ditangkapnya tokoh NU cukup menggemparkan dunia pesantren dan menggelisahkan warga NU. Mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, maka pada tanggal 1 September 1942 para konsul NU mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas pembelaan terhadap pimpinannya yang ditangkap oleh Jepang selain itu telah disepakati bersama bagaimana cara untuk menghadapi Jepang secara diplomatis dan lunak. Hal itu menurut pandangan NU, kemerdekaan Indonesia hanya tinggal waktu sehingga perlu dimanfaatkan kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun guna tercapainya kemenangan akhir bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.⁷⁴

Pertemuan antara tokoh-tokoh NU itu berhasil mengadakan perubahan struktur dan personalia organisasi. Perubahan itu atas dasar peristiwa ditangkapnya pemegang kendali NU dan pembatasan-pembatasan yang ketat oleh Jepang terhadap organisasi keagamaan. Bentuk perubahan personalia adalah sebagai berikut.

Ketua Besar	: H. H. Abdul Wahab Hasbullah
Rois Akbar	: K. H. Hasyim Asy'ari (ketika itu masih dalam penjara)
Ketua Tanfidiyah	: K. H. Nahrawi Thahar
Wakil Ketua	: K. H. Muhammad Noer

⁷³Zainul Milal Bizawie, *Loc. Cit.*

⁷⁴Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*, Hlm. 114.

Sekretaris : K. H. Abdul Wahid Hasyim (berhubung kemudian masuk PETA maka diganti oleh Syaifudidin Zuhri, karena kemudian ia pun ditugaskan di Jakarta maka diganti A. Aziz Diyar) Kemudian bendahara dan beberapa anggota syuriah lainnya.⁷⁵

Tampilnya K. H. A. Wahab Hasbullah menggantikan K. H. Mahfoed Shiddiq bersama K. H. A. Wahid Hasyim dalam pimpinan NU itu, segera memusatkan perhatian lahir dan batin untuk membesankan kedua tokoh tersebut dari tahanan beserta kyai-kyai yang lain di tangkap Jepang. Tindakan yang dilakukannya yakni dengan mengunjungi *Saikosikikan* (panglima tertinggi bala tentara Jepang di Jawa) *Gunseikan* atau kepala pemerintahan militer Jepang di Jakarta dan *Shuutyokan* (residen Jepang di Surabaya) dan para pembesar Jepang untuk membebaskan para tokoh-tokoh NU yang ditangkap tersebut. Setelah melampaui perjuangan yang panjang kurang lebih lima bulan berkat pertolongan Allah SWT, bebaslah K. H. Hasyim Asy'ari dari tahanan.⁷⁶

Dibebaskannya K. H. Hasyim Asy'ari, karena Jepang khawatir akan kehilangan simpati umat Islam, khususnya warga NU, karena memenjarakan tokoh mereka. Jepang sadar meskipun tokoh-tokoh mereka ditangkap tetapi semangat perjuangannya tidak mengendor.

Setelah pembebasan para tokoh NU baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur berhasil, tidak lama kemudian budaya *shinto* yang ditetapkan di Indonesia itu dihapuskan. Hal itu karena Jepang terus menerus

⁷⁵*Ibid*, Hlm, 126.

⁷⁶Zainul Milal Bizawie, *Op, Cit*, 131.

mendapat perlawanan keras dari umat Islam Indonesia. Perlawanan itu tidak hanya dari Tebuireng atau pesantren di Jawa Tengah saja, akan tetapi hampir diseluruh Indonesia. Misalnya di daerah Singaparna, Tasikmalaya yang oleh k. H. Zaenal Mustafa, seorang anggota NU yang pertama kali mengangkat senjata melawan *saikerei*. Selain itu, perlawanan juga dilakukan oleh Dr. Abdul Karim Amrullah dari Minangkabau.⁷⁷ Maksud Jepang menghapus budaya itu karena ingin mendapatkan dukungan aktif dari rakyat Indonesia. Maka Jepang berusaha mengubah taktik politiknya, seperti dengan sikapnya yang selalu menampilkan.

Kesan seolah-olah ingin memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan terhadap umat Islam. *Saikosikan* pernah mengundang 32 ulama Jawa dan Madura termasuk K. H. Muhfuz Siddiq dan K. H. Wahab Hasbullah dalam resepsi penghormatan Jepang terhadap para ulama di istana gubernur Batavia.⁷⁸ Hal itu berarti Jepang mulai mengakui kedudukan para kyai di Indonesia yang tidak bisa diremehkan pada masa kolonial Belanda.

Jepang memang tidak memberi kebebasan bagi organisasi keagamaan, karena selama pendudukannya di Indonesia semua organisasi politik dan keagamaan dibubarkan, tidak terkecuali organisasi NU di Jawa dan Madura. NU melihat Jepang akan menggunakan setiap organisasi untuk kepentingan alat propagandanya, oleh karena itu NU melakukan

⁷⁷Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdotul Ulama Negara*, Lkis, Yogyakarta, 1997, Hlm. 116.

⁷⁸Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdotul Ulama*, Hlm, 116.

gerakan terbatas di bidang tertentu, misalnya menghidupkan madrasah, pondok pesantren dan pengajian-pengajian.⁷⁹ Meskipun pemerintahan Jepang bersikap seperti itu, tetapi para tokoh agama, termasuk tokoh NU tetap beranggapan bahwa Jepang tetap lebih baik dari pada Belanda dalam hal melibatkan para pemimpin Indonesia dalam mengatur persoalan negara. Karena itu sikap NU terhadap Jepang tidak sekeras ketika menghadapi Belanda. NU lebih memilih sikap lunak dan diplomatis dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun juga. Syaifuddin Zuhri dalam makalahnya yang berjudul peranan NU dalam pengembangan Islam dan membela tanah air, menyebutkan:

“Kendati NU (seperti juga semua kekuatan masyarakat) mau tidak mau harus bekerja sama dengan Jepang (dalam bidang material), tapi hal itu tidak membuat NU bisa dibeli oleh Jepang. Akan tetapi di sinilah letak *Home Of The Game* menghadapi lawan. Di kalangan pesantren hal itu dikenal dengan istilah *Yahanmu* (dalam menghadapi lawan bukan untuk menghadapi kawan)”.⁸⁰

Karena sikap *Yahannu* itulah K. H. A. Wahid Hasyim beserta beberapa tokoh-tokoh NU dari Jawa Barat dan Cirebon diangkat oleh Jepang menjadi anggota legislatif buatan Jepang yang dikenal dengan sebutan *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat).⁸¹ Dengan

⁷⁹Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Mizan, Jakarta, 2012, hlm, 367.

⁸⁰Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*, Hlm, 117.

⁸¹Ahmad Mansyur Suryanegara, *Pemberontakan Tentara Peta, Yayasan Patria Mandiri*, Jakarta, 2006, Hlm 83.

memberikan kedudukan politik dan sosial kepada para ulama yang selama ini telah diperlakukan baik olehnya.

Kesempatan baik tersebut tidak di sia-siakan oleh k. H. Wahid Hasyim untuk melakukan kerja sama dengan kelompok lain supaya mengizinkan NU dan muhammadiyah melakukan aktifitasnya kembali. Ternyata usaha tersebut berhasil dan pada bulan september 1942 Jepang secara resmi mengizinkan kedua organisasi tersebut beroperasi kembali. Hal itu menunjukkan sikap NU terhadap Jepang memang tidak sekeras ketika menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Sikap diplomatis itu diambil mengingat jika mereka bekerja sama dengan Jepang maka fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan akan dapat dipergunakan untuk melancarkan misinya dalam rangka merebut kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan dari bangsa manapun juga.